

**PENGARUH STRATEGI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SERTA
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN NIAS BARAT**

Kasihniat Gustiani Lahagu¹, Joana L. Saragih², Jonner Pangaribuan³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas
Email : kgustianilahagu@gmail.com¹, saragihjoana@gmail.com², jonnerpangaribuan62@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to test how big the influence of Intensification, Extensification and Government Policy Strategies is on Increasing Regional Original Income. The sampling technique used is saturated sampling, which involves using all members of the population as samples. The data was obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKPD) of Nias Barat Regency from 2021 to 2023. The analysis technique employed in this study is Multiple Linear Regression with a significance level of 5%. Based on the t-test results, it shows that the Intensification Strategy has a positive and significant effect on Local Revenue with a calculated t_{value} (2.277) > t_{table} (2.014) and a significance level of $0.048 < 0.05$. Extensification also has a positive and significant effect on Local Revenue with a calculated t_{value} (2.161) > t_{table} (2.014) and a significance level of $0.036 < 0.05$. Additionally, Government Policy has a positive and significant effect on Local Revenue with a calculated t_{value} (5.480) > t_{table} (2.014) and a significance level of $0.000 < 0.05$. Furthermore, the F-test results indicate that the Intensification Strategy, Extensification, and Government Policy simultaneously have a positive and significant effect on Local Revenue with a calculated F value of 73.754 > F_{table} of 2.80 and a significance level of F at $0.000 < \alpha(0.05)$.

Keywords: *Intensification Strategy, Extensification, and Government Policy*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengelola sumber-sumber PAD secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Secara hukum Pendapatan Asli Daerah di atur dalam Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Selain itu dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 juga mengatur tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan kapasitas. Selain itu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, yakni pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan, sehingga untuk mencapai tujuan itu dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan serta meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah ditekankan untuk lebih mampu dalam mengurus kegiatan operasional rumah tangganya sendiri. Maka pemerintah daerah di tiap-tiap daerah memiliki fungsi serta tanggung jawabnya untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang, melalui sumber pendapatan asli daerah yang di ambil dalam suatu daerah yang bersangkutan, Yulianti (2000).

Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan melalui dua strategi, yaitu intensifikasi dan

ekstensifikasi. Menurut Halim (2007) Intensifikasi adalah upaya meningkatkan PAD dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang sudah ada, misalnya dengan memperbaiki system administrasi, meningkatkan tarif pajak/retribusi, dan memperluas basis pajak/retribusi. Sedangkan Menurut Tunliu (2008) Intensifikasi PAD adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Halim (2008) ekstensifikasi adalah upaya meningkatkan PAD dengan cara menggali sumber-sumber PAD baru, misalnya dengan mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi daerah yang belum dikembangkan. Menurut Halim, (2008) Kebijakan Pemerintah adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan ekonomi social.

Berikut hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2021-2023 tersaji pada tabel 1.

**Tabel 1 Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Barat
Tahun 2021-2023**

Tahun 2021

AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pajak Daerah	3.510.000.000	5.360.000.000	152.64
Retribusi daerah	1.530.000.000	190.000.000	12.16
Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	740.000.000	1.070.000.000	145.50
Lain-lain PAD yang sah	12.160.000.000	11.650.000.000	95.80
Jumlah PAD	17.940.000.000	18.270.000.000	101.82

Tahun 2022

AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pajak Daerah	5.830.000.000	6.340.000.000	108.66
Retribusi daerah	500.000.000	500.000.000	99.37
Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	1.070.000.000	1.430.000.000	133.36
Lain-lain PAD yang sah	7.660.000.000	4.390.000.000	57.36
Jumlah PAD	15.060.000.000	12.660.000.000	84.02

Tahun 2023

AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pajak Daerah	6.560.000.000	2.700.000.000	41.14
Retribusi daerah	520.000.000	200.000.000	37.72
Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	1.490.000.000	1.510.000.000	101.67
Lain-lain PAD yang sah	9.430.000.000	5.010.000.000	53.17
Jumlah PAD	18.000.000.000	9.420.000.000	52.35

Sumber : Bagian Keuangan Pendapatan Dan Keuangan Daerah

Tabel tersebut diatas menampilkan data mengenai anggaran dan realisasi pendapatan

daerah selama tiga tahun (2021-2023). Persentase realisasi terhadap anggaran menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Secara umum, pendapatan daerah mengalami fluktuasi :

2021: Realisasi melebihi target dengan 101,81%.

2022: Realisasi hampir mencapai target dengan 84,02%.

2023: Realisasi turun menjadi 52,35% dari anggaran.

Pentingnya perencanaan anggaran yang realistis dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah. Meskipun ada tahun-tahun di mana target tercapai atau bahkan terlampaui, terdapat juga penurunan signifikan di tahun-tahun lain yang memerlukan perhatian khusus untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pendapatan di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur sumber pendapatan daerah terdiri dari:

Pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Pengertian Strategi Intensifikasi

Menurut Halim (2007) Intensifikasi adalah upaya meningkatkan PAD dengan cara mengoptimalkan sumber – sumber PAD yang sudah ada, misalnya dengan memperbaiki system administrasi, meningkatkan tarif pajak/retribusi, dan memperluas basis pajak/retribusi. Sedangkan Menurut Tunliu (2008) Intensifikasi PAD adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah suatu tindakan usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Selain itu upaya intensifikasi pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan melalui kegiatan baik mencakup aspek

kelembagaannya, aspek ketatalaksanaanya maupun aspek personalianya.

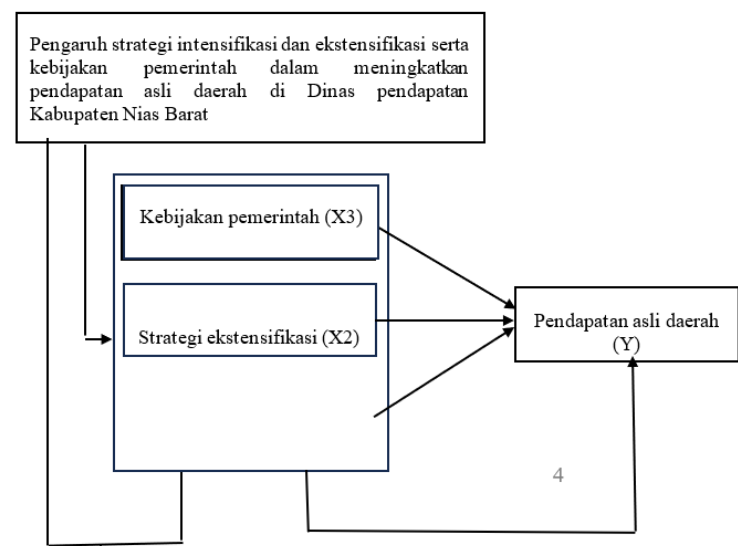
3. Pengertian Strategi Ekstensifikasi

Halim (2008) ekstensifikasi adalah upaya meningkatkan PAD dengan cara menggali sumber-sumber PAD baru, misalnya dengan mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi daerah yang belum dikembangkan. Ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan ekspansi untuk menambah objek-objek maupun subjek-subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang baru, serta berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusinya. Sehingga, dengan bertambahnya objek dan subjek pajak atau retribusi daerah yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah akibat bertambahnya penerimaan dari objek pajak dan retribusi daerah baru, hasil dari usaha ekstensifikasi.

4. Kebijakan Pemerintah

Menurut Halim (2008) Kebijakan Pemerintah adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan ekonomi social. Kebijakan pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup berbagai jenis yang bertujuan untuk meningkatkan, mengelola, dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah khususnya potensi pendapatan asli daerah.

KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1 Kerangka Berpikir
 Sumber: Diolah Oleh Penulis

- H1:** Strategi Intensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
H2: Strategi Ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
H3: Kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah) Kabupaten Nias Barat. Subjek penelitian atau adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling (acak/non-acak) yang digunakan, Nanang Martono (2010: 112). Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terlibat langsung dalam menghasilkan dan mengelola PAD di Kabupaten Nias Barat. Populasi penelitian ini mencakup pegawai yang aktif bekerja di tahun 2023.

Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Uji *t* digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji *F* digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) juga dihitung untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Operasionalisasi Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah (Y)
2. Strategi Intensifikasi (X1)
3. Strategi Ekstensifikasi (X2)
4. Kebijakan Pemerintah (X3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2 Tailed)	Keterangan
Strategi Intensifikasi (X1)	X1.1	,677**	,000	<i>Valid</i>
	X1.2	,891**	,000	<i>Valid</i>
	X1.3	,749**	,000	<i>Valid</i>
	X1.4	,883**	,000	<i>Valid</i>
	X1.5	,664**	,000	<i>Valid</i>
	X1.6	,645**	,000	<i>Valid</i>
Strategi Ekstensifikasi (X2)	X2.1	,823	,000	<i>Valid</i>
	X2.2	,540	,000	<i>Valid</i>
	X2.3	,901	,000	<i>Valid</i>

Variabel	Item Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2 Tailed)	Keterangan
	X2.4	,832	,000	<i>Valid</i>
	X2.5	,812	,000	<i>Valid</i>
	X2.6	,614	,000	<i>Valid</i>
Kebijakan Pemerintah (X3)	X3.1	,884	,000	<i>Valid</i>
	X3.2	,839	,000	<i>Valid</i>
	X3.3	,889	,000	<i>Valid</i>
	X3.4	,871	,000	<i>Valid</i>
	X3.5	,583	,000	<i>Valid</i>
	X3.6	,851	,000	<i>Valid</i>
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Y1	,890	,000	<i>Valid</i>
	Y2	,877	,000	<i>Valid</i>
	Y3	,869	,000	<i>Valid</i>
	Y4	,853	,000	<i>Valid</i>
	Y5	,504	,000	<i>Valid</i>
	Y6	,783	,000	<i>Valid</i>

Sumber : Olahan data primer SPSS 25

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items	Keterangan
Strategi Intensifikasi	,847	6	Reliabel
Strategi Ekstensifikasi	,849	6	Reliabel
Kebijakan pemerintah	,903	6	Reliabel
Pendapatan asli daerah	,884	6	Reliabel

Sumber : Olahan data primer SPSS 25

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien cronbach alpha strategi intensifikasi sebesar 0,847, strategi ekstensifikasi 0,849, kebijakan pemerintah 0,903, dan pendapatan asli daerah sebesar 0,884 lebih besar dari 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang koefisien, berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner adalah reliabel.

3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

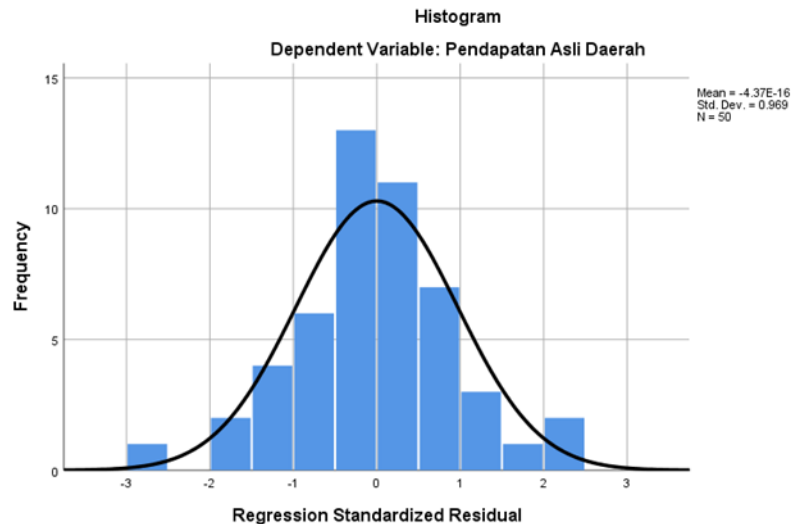
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Strategi Intensifikasi	50	7	24	16.38	4.589
Strategi Ekstensifikasi	50	6	30	18.94	5.843
Kebijakan Pemerintah	50	6	30	19.24	7.159
Pendapatan Asli Daerah	50	6	30	19.30	6.991
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Olahan data primer SPSS 25

4. Uji Asumsi Klasik

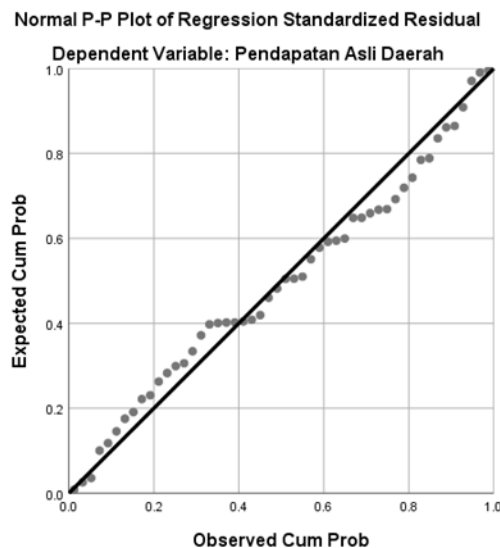
a. Uji Normalitas Data



Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Dalam Histogram

Sumber : Olahan data primer SPSS 25

Berdasarkan Gambar 2 di atas, hasil uji normalitas dalam histogram residual menunjukkan bahwa data distribusi normal grafik membentuk lonceng yang merupakan syarat untuk dapat dilakukan uji regresi. Atau bisa dilihat dari penyebaran data mengikuti garis diagonal pada grafik p-plot sebagai berikut



Gambar 3 Hasil Uji Normalitas Dalam P-Plot

Sumber : Olahan data primer SPSS 25

Grafik P-Plot diatas menunjukkan bahwa titik – titik data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal sehingga hal ini berarti data berdistribusi normal dan memenuhi uji

normalitas.

Tabel 5 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.90014560
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Olahan data primer SPSS 25

Pada uji *Kolmogorov-Smirnov*, residual data dikatakan normal jika nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka residual data dikatakan tidak normal. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* di atas diketahui bahwa nilai signifikan dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,200. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga mengindikasikan bahwa residual data telah berdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas
 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Strategi Intensifikasi	.986	1.014
	Strategi Ekstensifikasi	.249	4.011
	Kebijakan Pemerintah	.251	3.987

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Olahan data primer SPSS 25

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.1. Hasil Perhitungan nilai VIF menunjukkan nilai VIF variabel strategi intensifikasi (X1) 1.014, strategi ekstensifikasi (X2) 4.011, dan kebijakan pemerintah (X3) 3.987 lebih kecil dari 10. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki Multikolinearitas dikarenakan VIF tidak ada melebihi dari nilai batas toleransi yang ditentukan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Uji Glejser

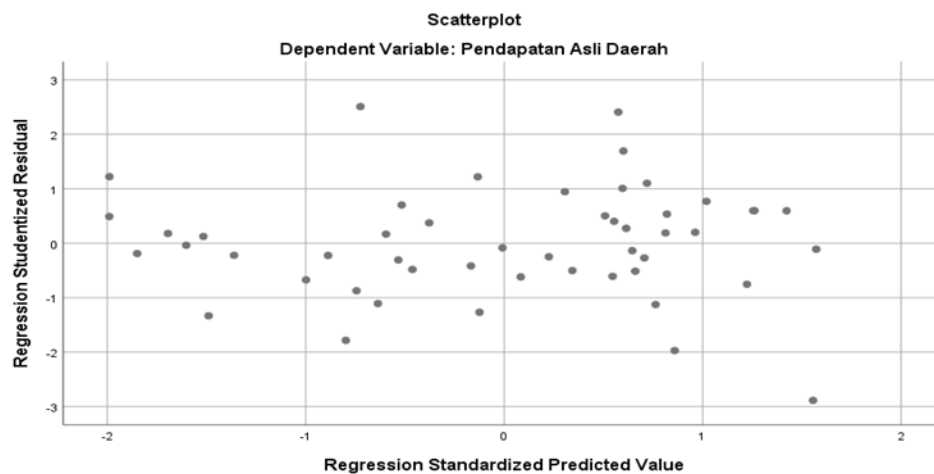
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.904	.952		1.999	.052
	x1	-.094	.118	-.309	-.799	.428
	x2	.005	.094	.016	.052	.959
	x3	.104	.108	.375	.964	.340

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Olahan data primer SPSS 25

Hasil uji glejser diatas menunjukkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) untuk variabel strategi intensifikasi adalah sebesar 0,428 variabel strategi ekstensifikasi 0,959 dan variabel kebijakan pemerintah 0,340. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas ketiga variabel bebas tersebut karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Berikut adalah hasil output SPSS untuk uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot*.



Gambar 4 Hasil Analisis Grafik Scatterplot

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokelasi

Tabel 8 Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 ^a	.828	.817	2.993	1.755

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pemerintah, Strategi Intensifikasi, Strategi Ekstensifikasi

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel 7 diatas nilai *Durbin Watson* sebesar 1,755, pembanding menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n)=50, dan jumlah variabel independen (k)=3, sedangkan nilai $dl = 1,4206$ dan $du = 1,6739$ yang mengacu pada *Durbin Watson* sehingga diperoleh nilai $4-dl = 2,5794$ dan $4-du = 2,3461$ maka diperoleh keputusan tidak terjadi autokorelasi karna nilai *WD* sebesar 1,755 terletak antara batas *du* dan $4-du$ maka tidak terjadi autokorelasi. Jika $du < d < 4-du$ ($1,6739 < 1,755 < 2,3461$), maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.301	2.001		.150	.881
	Strategi Intensifikasi	.026	.094	.017	2.277	.048
	Strategi Ekstensifikasi	.317	.147	.265	2.161	.036
	Kebijakan Pemerintah	.654	.119	.669	5.480	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

6. Uji Hipotesis

1. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 10 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.301	2.001		.150	.881
	Strategi Intensifikasi	.026	.094	.017	2.277	.048
	Strategi Ekstensifikasi	.317	.147	.265	2.161	.036
	Kebijakan Pemerintah	.654	.119	.669	5.480	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

2. Uji Simultan (Uji F)

$$F_{\text{tabel}} = F(k : n-k)$$

$$= F(3 : 100-3)$$

$$= F(3 : 47)$$

$$= 2,80$$

Tabel 11 Uji F

ANOVA^a

Model	Sum Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	-------------	----	-------------	---	------

1	Regression	1982.369	3	660.790	73.754	.000 ^b
	Residual	412.131	46	8.959		
	Total	2394.500	49			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Pemerintah, Strategi Intensifikasi, Strategi Ekstensifikasi

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0.05. Jika signifikan $F > 0.05$ maka diterima. Jika signifikan ≤ 0.05 maka ditolak. Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa Strategi Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Kebijakan Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di BPKPD Kabupaten Nias Barat. Pengaruh tersebut ditunjukkan pada nilai F_{hitung} sebesar 73,754 $> F_{tabel}$ sebesar 2,80 dan nilai signifikan F sebesar $0,000 < \alpha(0,05)$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa Strategi Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Kebijakan Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di BPKPD Kabupaten Nias Barat.

7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 ^a	.828	.817	2.993

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pemerintah, Strategi Intensifikasi, Strategi Ekstensifikasi

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pada table 4.16 diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,828 yang berarti didapatkan nilai determinasi sebesar 82,8%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi intensifikasi, ekstensifikasi dan kebijakan pemerintah memberikan pengaruh sebesar 82,8% terhadap pendapatan asli daerah. Sementara sisanya sebanyak 17,2 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain.

Pembahasan

1. Pengaruh strategi intensifikasi terhadap pendapatan asli daerah

Strategi intensifikasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh . Mattoasi, dkk. (2022) yang menyatakan bahwa intensifikasi, ekstensifikasi serta kebijakan pemerintah secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo.

2. Pengaruh strategi ekstensifikasi terhadap pendapatan asli daerah

Strategi ekstensifikasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh . Mattoasi, dkk. (2022) yang menyatakan bahwa intensifikasi, ekstensifikasi serta kebijakan pemerintah secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo.

3. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pendapatan asli daerah

Kebijakan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh . La Ode Darwin Dimi, dkk. (2022) yang menyatakan bahwa intensifikasi, ekstensifikasi serta kebijakan pemerintah secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

4. Pengaruh strategi intensifikasi, ekstensifikasi dan kebijakan pemerintah terhadap pendapatan asli daerah

secara simultan variabel Strategi Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Kebijakan Pemerintah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di BPKPD Kabupaten Nias Barat.

KESIMPULAN

Strategi Intensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1. Strategi Ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Kebijakan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Strategi Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Kebijakan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Koefisien determinan (R^2) sebesar 0,828 artinya Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh Strategi Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Kebijakan Pemerintah sebesar 82,8%, sedangkan 17,2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 9)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- La Ode Darwin Dimi, Sulhan Manaf , Aris Mahmud. (2022) Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Buton. *Jurnal Pengaruh Strategi* ,2302-245 volume 11 nomor 1 (33-49)
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mattoasi, mulayani Mahmud, maya wulandari iskandar (2024) Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Serta Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gorontalo. *Mattoasi, mulayani Mahmud, maya wulandari iskandar (2024) jurnal Pengaruh Intensifikasi* 2598-831 volume 8 nomor 1 (98-111)
- Nurhayati, N. (2015). Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance Pada Kabupaten / Kota Di Wilayah III Cirebon. *Jurnal JRKA*, 1(1), 49–61.
- Nursafitra, M. M. N. dan M. Yunus. (2019) Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. 5(1): 2460-6162.
- Safitra, N. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan

- Ekstensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang. JAKPP (*Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*), 5 (1) 37-48.
- Salehoddin. (2019). Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ekonomi & Manajemen. Volume 10, Nomor 2, 114-119.*
- Siswanto, J. (2019). Pengaruh Persepsi Aparat Atas Strategi Intesifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan, 1(1).*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabet.
- Tunliu J.J, (2010), Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 138 Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang NTT). *Tesis Universitas Brawijaya Malang.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Penjelasan, Penerbit, Visi Media
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Yuliati. (2000). *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kelima:* Salemba Empat, Jakarta.